

BERHARAP USAI MASA PENGABDIAN SAMPAI 64 TAHUN

Tunggul Jati Netral dalam Pilkada



Rapat Paguyuban Pamong Tunggul Jati Bantul di Omah Sawah.

BANTUL (KR) - Pamong kalurahan meliputi lurah, carik, jogoboyo, kamituwo, ulu-ulu, pangripto, danarto, dukuh hingga staf kalurahan se-Kabupaten Bantul yang tergabung dalam wadah Paguyuban Tunggul Jati Bantul melalui perwakilannya mengadakan pertemuan di Omah Sawah Sewon untuk menyamakan persepsi atau pendapat dalam memperjuangkan peningkatan kesejahteraan pamong.

Rapat yang dipimpin Ketua Paguyuban Tunggul Jati, Beja WTP SH MH (Lurah Canden), didampingi sekretarisnya Supriyanto SE (Jogoboyo Gilangharjo), digelar Senin (18/11), menghasilkan usulan atau permohonan yang akan segera disampaikan kepada pemerintah dan DPR bersama dengan paguyuban pamong se-Indonesia. Pada pertemuan tersebut seluruh anggota Paguyuban Tunggul Jati membuat pernyataan jika mereka komitmen bersikap netral dalam Pilkada 2024. Sementara ada beberapa permohonan dari Tunggul Jati di antaranya ten-

tang usia masa pengabdian. Masa tugas pamong yang sekarang dibatasi 60 tahun, agar bisa ditambah sampai 64 tahun.

"Kajian secara holistik, usia keemasan bagi pamong menurut kami ketika sudah tuntas menyelesaikan tugas menyekolahkan anaknya, menikahkannya, sehingga pada usia 55 hingga 60 tahun merupakan usia emas yang dimanfaatkan untuk pelayanan sepenuhnya kepada masyarakat. Maka kalau pada usia 60 tahun sudah purna tugas, sangat disayangkan," jelas Beja.

Selanjutnya pamong perlu dipikirkan statusnya oleh pemerintah, karena

pamong bukan merupakan ASN sehingga tidak ada pensiun dan peningkatan jenjang pendidikan. Maka pamong berharap ada perhatian dari pemerintah agar pamong bisa menikmati masa tua dari sisi pensiun.

"Sementara pendapatan pamong hingga saat ini dirasa masih minim. Karena kalau acuannya adalah UMK tetapi diatas kami dikunci dengan peraturan, sehingga tidak dapat menaikkan pendapatan pamong," imbuh Beja.

Hasil putusan rapat tersebut akan segera dikirim ke pemerintah dan DPR bersama paguyuban pamong se-Indonesia. (Jdm)-f

TPST Serap Ratusan Tenaga Kerja

BANTUL (KR) - Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) yang dibangun di beberapa titik Kabupaten Bantul dapat menyerap tenaga kerja ratusan orang dari masyarakat sekitar. "Kalau total serapan tenaga kerja dengan adanya TPST-TPST tersebut kurang lebih 200 orang, kemudian di TPST Modalan itu hampir 50-an," ungkap Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bantul, Bambang Purwadi, Senin (18/20). Diungkapkan, sudah ada empat TPST tingkat kabupaten yang dibangun pemerintah yaitu TPST konsep Intermediate Treatment Facility (ITF) di Pasar Niten, TPST Dingkikan di Argodadi, kemudian TPST di Sokowaten Tamanan dan TPST Modalan Banguntapan yang belum lama diresmikan.

Bambang mengatakan, keberadaan TPST dan sarana pengolahan sampah tersebut setidaknya dapat membantu masyarakat sekitar yang membutuhkan lapangan pekerjaan di sektor pengolahan sampah. "Sehingga mengakomodasi masyarakat lingkungan sekitar yang butuh pekerjaan, karena juga tidak mudah orang bekerja di tempat yang bau sampah, dan itu sudah UMR (upah minimum regional)," jelasnya.

Selain itu sejumlah TPS sistem reduce, reuse dan recycle (TPS3R) yang dibangun di kelurahan juga mampu memberdayakan masyarakat sekitar, baik secara langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan aktivitas pengelolaan sampah. (Zie)-f

SOSIALISASI PENGAWASAN PEMILU

TPS Harus Bisa Dilihat dari Semua Sisi

BANTUL (KR) - Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menggelar sosialisasi pengawasan Pilkada di Hotel Ros In Sewon, Senin (18/11), dengan mengundang petugas pengawas di tingkat kapanewon dan kalurahan yang ada di wilayah Banguntapan, Sewon dan Kasihan.

Ketua Bawaslu Bantul, Didik Joko Nugroho SAnT MIP, menekankan sosialisasi ini terkait dengan prosedur penghitungan suara, baik itu penghitungan di TPS maupun di PPK dan penghitungan suara di TPS itu harus dipastikan dilakukan secara terbuka.

Pengalaman penghitungan suara di Sewon pada Pemilu 2024, ada salah satu TPS ruangnya kurang terang dan tempat terlalu sempit, tidak bisa dilihat dari semua sudut sehingga berpengaruh memperlambat proses penghitungan. "Untuk itu diharapkan dalam Pilkada 2024, petu-

gas TPS maupun PPK bisa mengusahakan tempat yang presentatif untuk TPS," harapnya.

Dalam acara tersebut menghadirkan narasumber sumber Drs Muhammad Najib MSI dari Bawaslu DIY, mengambil tema teknik rekap hasil penghitungan suara. Mestri Widodo SE dari KPU Bantul, tentang identifikasi kerawanan rekap hasil penghitungan suara dan Bagus Sarwono SPdSi MPA tentang strategi pengawasan terhadap rekap hasil penghitungan suara.

Sementara sebelumnya, Bawaslu Bantul juga melaksanakan kegiatan konsolidasi penyelenggara Pilkada yang dihadiri Ketua Panwascam, Ketua Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Pengawas Kalurahan/Desa (PKD) se-Kabupaten Bantul.

Menurut Didik, konsolidasi ini diperlukan untuk membangun sinergi ketugasan baik penyelenggara



Sosialisasi pengawasan pemilihan tahapan rekapitulasi hasil penghitungan suara di Bawaslu Bantul.

teknis dari unsur KPU serta dari penyelenggara pengawasan dari unsur Bawaslu. Sinergi diperlukan terutama untuk menghadapi beberapa kegiatan tahapan yang akan segera dilaksanakan diantaranya masa ten-

ang, distribusi logistik, pemungutan dan penghitungan suara serta rekapitulasi hasil di tingkat kecamatan.

"Melalui konsolidasi ini juga diharapkan ada penyamaan persepsi terhadap permasalahan yang mungkin muncul pada saat pengawasan di TPS. (Jdm)-f

'THENG-THENG CRIT' DI PLAZA NGASEM

Satpol PP DIY-Bea Cukai Yogyakarta Edukasi Masyarakat Tentang Bahaya Rokok Ilegal

YOGYA (KR) - Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) DIY bersama Bea Cukai Yogyakarta menggelar acara bertajuk 'Theng-Theng Crit (Thenguk-Thenguk Crita) Gempur Rokok Ilegal' di Plaza Ngasem Yogyakarta, Selasa (19/11). Kegiatan dihadiri oleh ratusan masyarakat.

Dalam acara yang dikemas serius tapi santai ini, Satpol PP DIY dan Bea Cukai Yogyakarta mengajak masyarakat untuk ikut memerangi peredaran rokok ilegal di DIY. Selain itu disampaikan edukasi mengenai bahaya rokok ilegal, ciri-ciri rokok ilegal dan pengetahuan seputar cukai.

Kegiatan tersebut didukung oleh PT BP Kedaulatan Rakyat sebagai support event, dipandu oleh Kelik Pelipur Lara dan Endah Sharaswati dimenangkan Istimewa Band. Turut mendukung PT Bank BPD DIY. Kegiatan semakin meriah dengan fun games dan disediakan angkringan gratis untuk warga

yang hadir. Kepala Bidang Penegakan Perundang-undangan Satpol PP DIY, Ilham Junaidi menuturkan, kegiatan di Plaza Ngasem ini merupakan salah satu bagian dari upaya pengawasan dan penegakan hukum rokok ilegal di DIY. "Satpol PP DIY terus memerangi peredaran rokok ilegal di DIY," katanya.

Turut hadir dalam acara antara lain Komisaris Utama PT BP Kedaulatan Rakyat Imam Satriadi SH, didampingi jajaran komisaris dan direksi KR, Kasatpol PP kabupaten/kota se DIY, perwakilan PT Bank BPD DIY dan Kapolsek Kraton AKP Dwi Pujiastuti.

Menurut Ilham, kegiatan ini dibiayai oleh Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DB HCHT). Peruntukan DBHCHT sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu untuk kesejahteraan rakyat (50%), untuk kesehatan (40%), dan untuk upaya penegakan hukum (10%). "Kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal ini masuk ke dalam penegakan hukum, di samping ada kegiatan lain seperti operasi dan iklan layanan masyarakat," jelasnya.

Lebih lanjut dikatakan Ilham, penyelenggaraan kegiatan sosialisasi gempur rokok ilegal kali ini sengaja dipilih di Plaza Ngasem karena merupakan salah satu ikon budaya di Yogyakarta, dan pusat perekonomian masyarakat. "Rokok ilegal, selain merugikan negara, juga merugikan perekonomian daerah. Maka mari kita sama-sama perangi peredaran rokok ilegal," ajaknya.

Sementara itu, Humas Bea Cukai Yogyakarta Bimo Adi Saputro menjelaskan tentang cukai. Menurutnya, cukai adalah pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu, salah satunya rokok. Cukai sifatnya untuk membatasi atas barang-barang tertentu, sehingga tidak semua barang di Indonesia dikenai cukai.

Barang-barang selain rokok yang dikenai cukai yaitu minuman keras/beralkohol dan etanol/etil alkohol. Karena dibatasi konsumsinya, maka barang-barang itu diawasi. Ke depan, barang-barang seperti



Foto bersama Jajaran komisaris dan direksi PT BP KR bersama Satpol PP DIY dan Bea Cukai Yogyakarta.

plastik (kresak) dan minuman berpemanis dalam kemasan juga akan dikenai cukai.

"Harapannya, ketika sebuah barang dikenai cukai, maka harganya akan naik, sehingga konsumsi masyarakat atas barang tersebut menjadi berkurang, beralih ke barang yang lebih aman, sehat dan tidak merusak lingkungan," ujar Bimo.

Bimo menjelaskan tentang ciri-ciri rokok legal yaitu ada pita cukai dilekatkan pada kemassannya. Pita cukai asli memiliki cetakan yang tajam. Pita cukai asli tidak berpendar jika disinari UV. Hologram pada pita cukai terlihat berdimensi jika dilihat dari sudut yang berbeda.



Sosialisasi gempur rokok ilegal oleh Ilham Junaidi dari Satpol PP DIY dan Sosialisasi tentang cukai oleh Bimo Adi Saputro dari Bea Cukai.

Sedangkan rokok ilegal cirinya rokok polos atau tidak dilekatkan pita cukai, pita cukai palsu, pita cukai bekas pakai, pita cukai salah peruntukan, pita cukai salah personalisasi.

Rokok dengan pita cukai legal telah dipastikan aman sebelum beredar. Sedangkan rokok ilegal tidak memenuhi standar, termasuk dari segi kandungan nikotin dan tarinya. "Peningkatan penjualan dan menawarkan rokok ilegal bisa dikenakan sanksi pidana dan denda. Maka jual atau belilah ro-

kok yang legal saja. Mari bersama-sama kita gempur rokok ilegal," ajaknya.

Ketua Panitia sekaligus Direktur Keuangan PT BP Kedaulatan Rakyat, Yuriya Nugroho Samawi MSc mengatakan, antusiasme masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi ini cukup tinggi. Menurutnya PT BP KR akan terus ikut mendukung program-program pemerintah dalam upaya memerangi rokok ilegal. "Ini sejalan dengan tagline KR yaitu Migunani Tum-raping Liyan," katanya. (Dev)



Panitia sosialisasi gempur rokok ilegal.



Suasana acara 'Theng-Theng Crit (Thenguk-Thenguk Crita) Gempur Rokok Ilegal' di Plaza Ngasem Yogyakarta.



Masyarakat antusias mengikuti acara.